

MEWUJUDKAN PARADIGMA VOCATIONAL EDUCATION FOR ALL (VoEFA) MELALUI STRATEGI KERJASAMA SINERGIS

Wagiran

Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Pendidikan vokasi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja dituntut mampu menghasilkan *learning outcome* yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Disamping itu pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan agen perubahan dalam meningkatkan ketahanan, daya saing, dan kejayaan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut pendidikan vokasi perlu diposisikan dalam kerangka *Vocational Education for All* (VoEFA) yang terdiri dari 9 pilar: (1) Keluarga sadar vokasi; (2) Pendidikan vokasi sejak dini; (3) Pendidikan vokasi dalam lingkup jalur pendidikan (formal, non formal, informal), pelatihan, dan pengalaman kerja; (4) Pendidikan vokasi yang ramah dan layak bagi kaum *difable*; (5) Pendidikan vokasi responsif gender; (6) Pendidikan vokasi sebagai pemandu pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa; (7) Pendidikan vokasi yang dinamis, adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial dan perkembangan IPTEKS; (8) Pendidikan vokasi berbasis mutu; dan (9) Kolaborasi terpadu dan saling menguntungkan antara siswa (lulusan), dunia usaha/dunia industri (Du/Di), pemerintah, dan masyarakat. Melalui kerjasama sinergis baik *triple helix* maupun *penta helix* dalam kerangka VoEFA diharapkan tumbuh inovasi dan kreatifitas dalam menunjang daya tahan, daya saing dan kejayaan bangsa.

Kata Kunci: pendidikan vokasi, *Vocational Education for All*, *triple helix*, *penta helix*

Pendahuluan

Keselarasan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja merupakan isu yang selalu aktual terutama dalam kerangka pendidikan vokasi (*vocational education*). Hal ini tidak terlepas dari esensi maupun karakteristik pendidikan vokasi sebagai bagian dari pendidikan yang menyiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja. Dapat pula dimaknai bahwa pendidikan vokasi pada dasarnya merupakan jembatan menuju dunia kerja, sehingga keberhasilannya dapat dinilai dari seberapa dekat jalinan maupun relevansinya dengan dunia kerja.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 merupakan inovasi dan kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi/keselarasan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Hal ini dilandasi berbagai kondisi dan situasi yang menunjukkan masih rendahnya relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Salah satu hal penting yang termuat dalam KKNI tersebut adalah pengakuan kompetensi kejuruan (*Recognize Prior Learning*) yang diperoleh dari berbagai jalur pendidikan baik formal, non formal, informal, pelatihan maupun pengalaman kerja. Hal tersebut mengandung makna dan konsekuensi bahwa *vocational education* pada dasarnya diperlukan secara menyeluruh baik dalam lingkup formal, non formal, maupun informal. Aplikasi *vocational education* saat ini yang lebih dominan berorientasi ke jalur formal, secara holistik perlu segera ditempatkan dalam kerangka pendidikan vokasi untuk semua (*Vocational Education for All/VoEFA*) dalam seluruh jalur dan jenjang pendidikan secara proporsional.

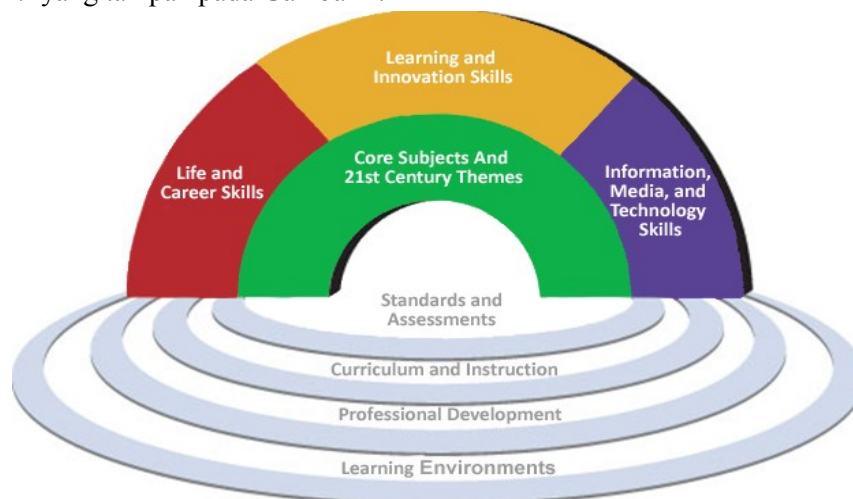
Upaya mewujudkan VoEFA tentu tidak dapat dilepaskan dari kerjasama sinergis dengan berbagai pihak. Selaras dengan karakteristik pendidikan teknologi dan kejuruan maka kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan dunia kerja merupakan bagian penting dari eksistensi pendidikan teknologi dan kejuruan. Dapat dinyatakan bahwa selama pendidikan teknologi dan kejuruan masih ada, maka selama itu pula kerjasama akan terus diperlukan. Menjadi tantangan bagi

dunia pendidikan khususnya pendidikan pendidikan vokasi untuk mewujudkan sinergi kerjasama yang mampu mewujudkan paradigma VoEFA.

Tulisan ini ingin mengupas secara komprehensif pentingnya paradigma holistik dalam pengembangan pendidikan vokasi yang tertuang dalam paradigma VoEFA sekaligus beragam pola kerjasama sinergis yang dapat dan perlu dilakukan.

Paradigma Pengembangan *Vocational Education*

Paradigma pengembangan pendidikan vokasi ke depan tentu tidak terlepas dari karakteristik dunia kerja dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam era mendatang. Dalam kacamata pendidikan vokasi, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah seberapa relevan *learning outcome* yang dihasilkan dunia pendidikan dengan karakteristik tenaga kerja yang dibutuhkan di masa mendatang. Berbagai kajian merumuskan *learning outcome* yang diperlukan bagi lulusan dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. *The Partnership for 21st Century Skills* (www.21centuryskills.org; Wagiran, 2012) merumuskan *21st century student outcomes and support system* yang tampak pada Gambar 1.



Gambar 1. 21st Century Student Outcomes and Support System

Pemikiran yang tertuang pada Gambar 1 tersebut menunjukkan cara pandang holistik tentang pembelajaran yang diperlukan guna mewujudkan lulusan yang memiliki kompetensi komprehensif. Kompetensi tersebut meliputi aspek kemampuan dasar (bahasa, seni, matematik, ekonomi, sains, geograf, sejarah, dan kewarganegaraan); kemampuan belajar dan inovasi (kreatifitas dan inovasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi); kemampuan mengelola informasi, media, dan teknologi informasi; serta kemampuan hidup dan karir (*life and career skills*). Apabila dilihat dari dimensi-dimensi yang tertuang dalam kompetensi yang diharapkan tersebut, tampak jelas bahwa penanaman karakter merupakan tuntutan bagi lulusan agar mampu berjaya di era mendatang.

Bernie & Charles (Djoko Suyanto, 2012) merumuskan *21st Century Essential Skills* meliputi: *learning & Innovation, digital literacy, career & life, digital age literacy, inventive thinking, dan high order thinking*. Sedangkan Kay yang dikutip Zamroni (2009) merumuskan 5 kondisi atau konteks baru dalam kehidupan berbangsa, yang masing-masing memerlukan kompetensi tertentu dan menjadi tugas pendidikan untuk mempersiapkan warga negara di abad 21. Kelima kondisi tersebut adalah: (1) kondisi kompetisi global (perlu kesadaran global dan kemandirian), (2) kondisi kerjasama global (perlu kesadaran global, kemampuan bekerjasama,

penguasaan ITC), (3) pertumbuhan informasi (perlu melek teknologi, *critical thinking* & pemecahan masalah), (4) perkembangan kerja dan karier (perlu *critical thinking* & pemecahan masalah, inovasi & penyempurnaan, dan, fleksibel & adaptable), (5) perkembangan ekonomi berbasis pelayanan jasa, *knowledge economy* (perlu melek informasi, *critical thinking* dan pemecahan masalah). Dengan kondisi tersebut, lembaga pendidikan harus mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan: (1) kesadaran global, (2) watak kemandirian, (3) kemampuan bekerjasama secara global, (4) kemampuan menguasai ITC, (5) kemampuan melek teknologi, (6) kemampuan intelektual yang ditekankan pada *critical thinking* dan kemampuan memecahkan masalah, (7) kemampuan untuk melakukan inovasi & menyempurnakan, dan, (8) memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat fleksibel & adaptabel.

Berdasarkan temuan-temuan di atas tampak bahwa kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan di masa mendatang pada dasarnya merupakan gabungan secara komprehensif aspek-aspek *hard skills* maupun *soft skills* yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dan situasi pembelajaran di berbagai jalur pendidikan, pelatihan, maupun di masyarakat luas. Menjadi tugas lembaga pendidikan untuk memformulasikan kedua aspek tersebut sehingga nantinya tercermin dalam kualitas lulusan yang dihasilkan. Lembaga pendidikan dituntut menghasilkan *learning outcome* selaras dengan tuntutan tersebut.

Pentingnya keselarasan *outcome* dari lembaga pendidikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja mendorong pemerintah melakukan upaya standarisasi dan sinkronisasi dengan ditetapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat ***menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan*** antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dari pengertian tersebut paling tidak tersirat dua makna penting yaitu integrasi dan penyetaraan antara bidang pendidikan (formal, non, formal, informal) dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam mewujudkan tenaga kerja berkualifikasi nasional. Secara jelas paradigma tersebut dapat dicermati pada Gambar 2 dan 3 berikut:



Gambar 2. Paradigma Pengembangan KKNI



Gambar 3. Penyetaraan Antar Sektor dalam Mewujudkan KKNi

Berdasarkan paradigma yang tercermin pada gambar 2 dan 3 tersebut secara jelas tersirat bahwa pendidikan vokasi secara komprehensif meliputi pendidikan dalam lingkup formal, non formal, informal, maupun pelatihan dan pengalaman kerja. Sudah saatnya pendidikan vokasi dikembangkan secara selaras dan seimbang dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan secara komprehensif. Tidak berlebihan apabila jargon *Vocational Education for All (VoEFA)* saatnya didengarkan.

Vocational Education for All (VoEFA)

Paradigma VoEFA merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari kajian reflektif yang penulis lakukan berdasarkan berbagai kajian teoritis dan faktual dirangkai dengan pengalaman penulis terlibat dalam berbagai program pemberdayaan dalam lingkup pendidikan formal, non formal dan informal. Kerangka awal yang penulis ajukan (Wagiran, 2008) berupa butir-butir pemikiran pengembangan pendidikan vokasi secara holistik. Butir-butir tersebut meliputi: (1) Pendidikan vokasi sebagai pemandu pertumbuhan ekonomi, (2) Pendidikan vokasi sebagai pelestari nilai-nilai dan norma serta agen perubahan, (3) Pendidikan vokasi meningkatkan daya saing bangsa, (4) Pendidikan vokasi sejak dini, (5) Pendidikan vokasi berbasis mutu, (6) Pendidikan vokasi mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, (7) Pendidikan vokasi tidak sebatas pendidikan dalam lingkup formal, (8) Kurikulum pendidikan vokasi yang dinamis, adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial dan IPTEKS, (9) Kolaborasi terpadu dan saling menguntungkan antara siswa (lulusan), dunia usaha/dunia industri (Du/Di), pemerintah, dan masyarakat.

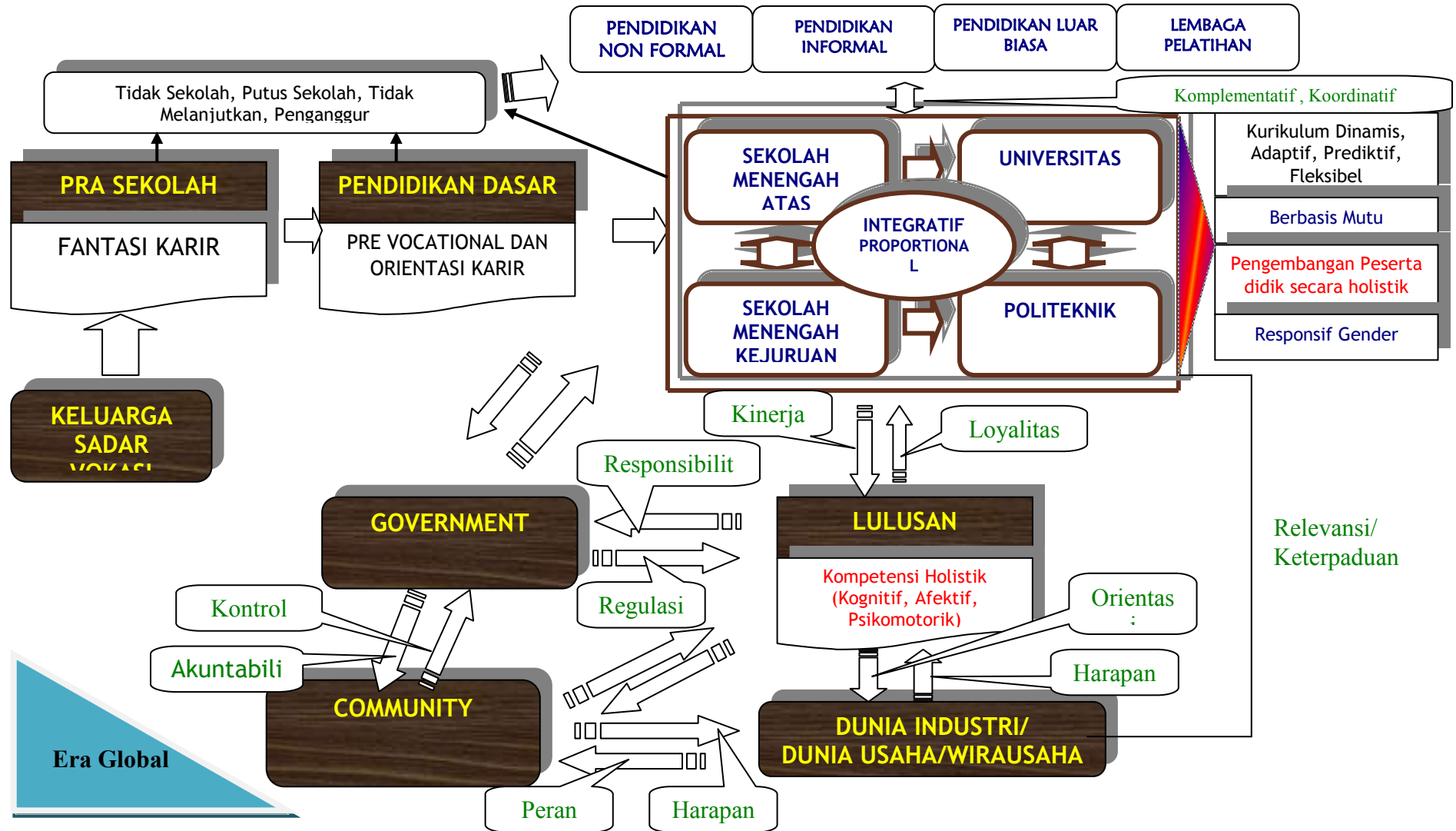
Dengan memperhatikan tuntutan ke depan, menurut penulis dibutuhkan pengembangan pendidikan vokasi secara komprehensif yang tertuang dalam butir-butir VoEFA (Gambar 4) yang meliputi:

1. Keluarga sadar vokasi

Keluarga sebagai bagian dari masyarakat merupakan wahana efektif dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan vokasi. Dengan

kesadaran vokasi diharapkan orangtua dapat membimbing dan mengarahkan anak-anaknya selaras dengan tahap-tahap perkembangan vokasionalnya. Orang tua dapat memberikan pemahaman, arahan, maupun bimbingan bagi anak dalam menentukan orientasi karirnya di masa depan selaras dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Perwujudan keluarga yang sadar vokasi juga sangat penting dalam kerangka perwujudan masyarakat sadar vokasi. Terwujudnya masyarakat sadar vokasi merupakan potensi luar biasa bagi tumbuh dan berkembangnya pendidikan vokasi secara luas. Dengan demikian fungsi pendidikan vokasi sebagai pemandu pertumbuhan ekonomi, pelestari nilai-nilai luhur bangsa, agen perubahan serta penguat daya saing bangsa dapat berjalan lebih optimal. Oleh karenanya berbagai upaya mulai dari sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi maupun advokasi perlu dilakukan secara tersistem dan terencana.



Gambar 4. Paradigma *Vocational Education for*

2. Pendidikan vokasi sejak dini

Karir seseorang tidaklah didapat secara tiba-tiba, namun memerlukan proses panjang dan berkelanjutan. Perencanaan dan penyiapan karir yang matang sejak dini diharapkan membantu seseorang dalam memilih karir secara tepat, mengurangi keterlambatan atau kekeliruan dalam memilih karir. Pentingnya pendidikan vokasi sejak dini dapat dicermati dari tahap-tahap perkembangan karir seperti Tabel 1.

Tabel 1. Tahap—tahap Perkembangan Vokasional

Perkembangan Vokasional	Usia	Deskripsi Umum
Tahap Penyurutan	70 tahun ke atas (Usia Pensiun)	Seseorang mulai menarik diri dari peran aktif dalam karirnya, merenung kebermaknaan hidup
	65 – 75 tahun (Deselerasi)	Kapasitas mulai menyusut, terjadi penurunan kemampuan secara umum dan perlambatan produktivitas
Tahap Pelestarian	45-64 (Maintenance)	Pencapaian puncak karir, ada pergeseran fokus dari aspek individual ke aspek sosial, diperolehnya jaminan (job security) dan kepuasan terhadap pekerjaan
Tahap Pematapan Karir	31-44 tahun (Kemajuan)	Seseorang secara intens meniti mobilitas karirnya secara vertikal sampai mencapai taraf konsolidasi antara potensi diri dengan kompetensi yang dituntut
	25-30 tahun (Penyesuaian)	Proses penyesuaian diri, seringkali ditandai dengan perpindahan pekerjaan atau pergantian karir
Tahap Eksplorasi karir	22-24 tahun (Trial/coba-coba)	Pengalaman awal dalam pekerjaan/karir sebagai bagian dari proses occupational choice, masih sangat terbuka untuk berubah pilihan
	18 – 21 tahun (Transisi)	Proses transisi yang ditandai oleh penentuan tentatif preferensi karir dengan memasuki pendidikan atau pelatihan tertentu, mulai tumbuh komitmen pribadi
	15-17 tahun (Tentatif)	Proses kristalisasi gagasan tentang perlunya bekerja, konsep diri tentang karir dan pekerjaan, penajagan terhadap macam-macam bidang kerja
Tahap Pertumbuhan	13-14 tahun (Kapasitas)	Anak didik mulai menyadari kapasitas diri, belajar mengatur waktu untuk menghasilkan suatu produk, mementingkan tugas sekolah daripada bermain
	11-12 tahun (Minat)	Anak didik mulai menunjukkan minat terhadap kerja, membedakan karakteristik karir di lingkungan
	4 – 10 tahun (Fantasi)	Anak didik mulai mengidentifikasi pekerjaan orangtua dan orang sekitar, berfantasi dan bermain peran tentang bermacam-macam pekerjaan

Sumber: Sukamto (1988)

Berdasarkan tahap-tahap vokasional yang terangkum pada Tabel 1. tersebut tampak jelas bahwa pada dasarnya sejak kecil manusia sudah dihadapkan pada pilihan karir sesuai dengan tahap-tahap perkembangan vokasionalnya. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pendidikan vokasi sebagai upaya menjamin perkembangan vokasional secara optimal diperlukan sepanjang hayat mulai usia dini hingga usia lanjut. Secara dini dalam lingkup keluarga, pengembangan pendidikan vokasi dapat dilakukan dengan upaya orangtua mengenalkan anak pada berbagai macam profesi (fantasi). Dalam lingkup persekolahan mulai tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah menengah dan perguruan tinggi perlu dikembangkan pendidikan vokasi dengan berbagai variasinya. Misalnya tahap pengembangan kecerdasan motorik (di SD), orientasi karir (SMP), eksplorasi dan pematapan karir (Sekolah Menengah) untuk kemudian hidup di masyarakat (Wagiran, 2008: 1831).

3. Pendidikan vokasi dalam lingkup jalur pendidikan (formal, non formal, informal), pelatihan, dan pengalaman kerja.

Dalam posisi sebagai negara berkembang, saat ini kita masih dihadapkan permasalahan penduduk yang kurang beruntung yaitu tidak sempat mengenyam pendidikan formal, putus sekolah, atau lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan dan penganggur yang jumlahnya cukup besar. Mereka perlu mendapat perhatian serius, salah satunya adalah melalui program-program pelatihan kerja sehingga mampu meningkatkan kesiapannya untuk memasuki dunia kerja. Dalam konteks tersebut pendidikan vokasi memegang peran strategis dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

Pengalaman penulis dalam berbagai kegiatan dalam lingkup pendidikan formal maupun non formal menunjukkan bahwa pendidikan vokasi hingga saat ini masih dominan bergerak dalam sektor formal khususnya melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Akademi, Politeknik, Institut maupun Universitas. Lulusan jalur formal tersebut sebagian besar juga didesain secara dominan untuk bekerja di sektor formal. Program-program non formal maupun informal seperti pemberantasan buta aksara, kesetaraan, *life skills*, kursus, pelatihan, *home schooling*, dan sejenisnya tampak kurang tersentuh aspek-aspek vokasinya. Bahkan kurikulum pendidikan vokasi dalam berbagai jenjang pendidikan yang ada saat ini bisa dikatakan tidak memadai dan menyiapkan lulusannya untuk bekerja di sektor non formal maupun informal. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan bidang vokasi-pun tampak dominan menyiapkan calon guru SMK dan belum terpikirkan untuk menyiapkan calon-calon tutor, instruktur, maupun pamong pendidikan masyarakat yang siap bekerja di lembaga-lembaga kursus, lembaga pelatihan kerja, pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat, dan sejenisnya. Aspek vokasional juga terlihat belum tampak dalam standar kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah yang berorientasi menghasilkan pamong maupun tutor pendidikan non formal di masyarakat.

Selaras dengan kondisi ketenagakerjaan di atas, sudah saatnya apabila pendidikan vokasi tidak sekedar diorientasikan dalam lingkup formal. Pendidikan vokasi perlu diorientasikan secara sinergis untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja baik dalam sektor formal, non formal, maupun informal. Demikian pula halnya proses pendidikan yang dilakukan tidak hanya jalur formal tetapi secara komprehensif dan terpadu melibatkan pula pendidikan dalam jalur non formal, informal, pelatihan maupun pengalaman kerja.

4. Pendidikan vokasi yang ramah dan layak bagi kaum *difable* (*Vocational Education for Difable*)

Pada dasarnya karir dan pekerjaan merupakan hak setiap warga negara termasuk penduduk dengan kebutuhan khusus (*difabel*). Ketunaan bukanlah halangan bagi seseorang untuk

memilih dan menjalankan karir sesuai dengan potensinya. Telah banyak contoh dan bukti yang menunjukkan bahwa kaum *difable* mampu meraih sukses sesuai dengan pilihan karir yang ditempuhnya. Oleh karenanya pendidikan vokasi dituntut mampu menciptakan desain pendidikan dan pelatihan yang ramah dan layak bagi kaum *difable*.

5. Pendidikan vokasi responsif gender

Pendidikan vokasi hingga saat ini masih diwarnai adanya kesenjangan maupun bias gender. *Stereotype* yang berkembang di masyarakat menyebabkan terhalangnya akses, kontrol dan manfaat yang sama bagi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan layanan pendidikan vokasi yang setara. Dalam penelitian Ace Suryadi (2004) salah satu kesenjangan gender dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan vokasi adalah pemilihan bidang keahlian atau jurusan baik dalam lingkup pendidikan menengah (Sekolah Menengah Kejuruan) maupun lingkup perguruan tinggi. *Stereotype* yang berkembang di masyarakat dominan mengatakan bahwa teknologi merupakan bidang yang cocok bagi laki-laki dan kurang cocok bagi perempuan. Fakta menunjukkan bahwa siswa perempuan lebih mendominasi program keahlian Bisnis dan Manajemen dan jurusan lain yang lekat dengan peran domestik sedangkan laki-laki dominan memilih bidang teknologi industri dan jurusan yang lekat dengan aspek produksi. Masih sangat sedikit perempuan yang memilih bidang teknologi dan industri disebabkan oleh persepsi bahwa bidang tersebut tidak pantas untuk perempuan. Oleh karenanya menjadi tantangan bagi pendidikan vokasi untuk merubah *mindset* tersebut menuju kesetaraan gender bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memilih jurusan sesuai kemampuannya tanpa memandang perbedaan jenis kelamin.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya menjamin bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan yang layak dan nyaman baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menjadi tantangan untuk mewujudkan pendidikan vokasi yang responsif gender, atau dengan kata lain diperlukan desain pendidikan vokasi yang layak baik untuk laki-laki maupun perempuan.

6. Pendidikan vokasi sebagai pemandu pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.

Paradigma yang menyatakan bahwa pendidikan vokasi harus sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja sebagai akibat pertumbuhan ekonomi seyogyanya diubah menjadi pendidikan semestinya mampu menjadi pemandu pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini berarti bahwa pendidikanlah yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Pendidikan semestinya menjadi institusi pusat pembaharuan baik pada tingkat mikro maupun pada tingkat makro. Pada tingkat mikro pendidikan harus mampu menciptakan iklim berkembangnya kreativitas dan kemandirian sedangkan pada pada tingkat mikro menuntut sistem majemen yang unggul. Disamping itu pengembangan pendidikan vokasi haruslah diarahkan pada upaya meningkatkan daya saing suatu bangsa dalam menghadapi kehidupan di era global. Aset paling penting dalam era ini adalah *human capital* atau *intellectual capital*. Dengan demikian pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mengembangkan SDM dan teknologi sebagai penentu daya saing bangsa. Persaingan dalam hal ini hendaklah tidak dianggap sebagai suatu yang merugikan, namun sebagai suatu hal yang sangat berguna dalam memacu peningkatan kapasitas, produktivitas dan kemampuan teknologi (Wagiran, 2008)

7. Pendidikan vokasi yang dinamis, adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial dan perkembangan IPTEKS

Dalam era *knowledge based economy* ke depan pendidikan vokasi dituntut semakin dinamis, adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial dan perkembangan IPTEKS. Dalam hal ini kurikulum memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan lulusan pendidikan vokasi yang selaras dengan tuntutan dunia kerja. Beberapa karakteristik minimal

yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan vokasi masa depan antara lain:

- Berorientasi pada Kebutuhan SDM Era Global
- Berorientasi pada Filosofi Pengembangan Pendidikan
- Berorientasi pada Tujuan dan Kondisi Pendidikan Nasional
- Berorientasi pada Perkembangan Iptek
- Berorientasi pada Kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat
- Berorientasi pada Karakteristik Daerah Setempat
- Berorientasi pada Karakteristik Peserta Didik
- Orientasi Hasil Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Selain aspek tersebut pendidikan vokasi dituntut mampu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh/holistik. Pendidikan merupakan proses *humanisasi* yaitu proses memanusiakan manusia muda menjadi pribadi yang utuh, yaitu manusia yang mampu mengembangkan unsur rasionalitas, kesadaran, akal budinya (pengetahuan), mengembangkan segi spiritualitas, moralitas, sosialitas, karakter, keselarasan dengan alam, serta rasa dan emosinya. Bila manusia yang kita inginkan adalah manusia yang utuh dalam semua segi kemanusiaannya maka jelas bahwa pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik/manusia muda menjadi manusia seutuhnya haruslah menyangkut semua unsur kehidupan manusia seperti spiritualitas, moralitas, karakter, sosialitas, rasa, rasionalitas. Pendidikan bukan hanya menekankan segi pengetahuan saja namun harus memperhatikan sisi yang lain secara integratif

8. Pendidikan vokasi berbasis mutu

Penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis mutu merupakan syarat mutlak bila diinginkan pendidikan vokasi yang unggul, berdaya, dan akuntabel. Pengendalian dan penjaminan mutu harus dilakukan mulai dari input, proses, *output* maupun *outcome*. Aspek mutu yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: fokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran komitmen, dan perbaikan berkelanjutan. Melalui perpaduan lima aspek tersebut diharapkan tercipta pendidikan vokasi yang bermutu.

9. Kolaborasi terpadu dan saling menguntungkan antara siswa (lulusan), dunia usaha/dunia industri (Du/Di), pemerintah, dan masyarakat

Upaya mewujudkan *learning outcome* yang selaras dengan tuntutan dunia kerja diyakini tidak dapat terwujud bila tidak disertai dengan kerjasama sinergis antara lembaga pendidikan dengan berbagai *stakeholders* termasuk dunia kerja. Bahkan dapat dinyatakan bahwa kerjasama sinergis merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya pendidikan vokasi yang kuat dan efektif. Oleh karenanya menjadi tantangan untuk mewujudkan kerjasama sinergis yang saling menguntungkan antar berbagai pihak dalam pelaksanaan pendidikan vokasi.

Strategi Membangun Kerjasama Sinergis

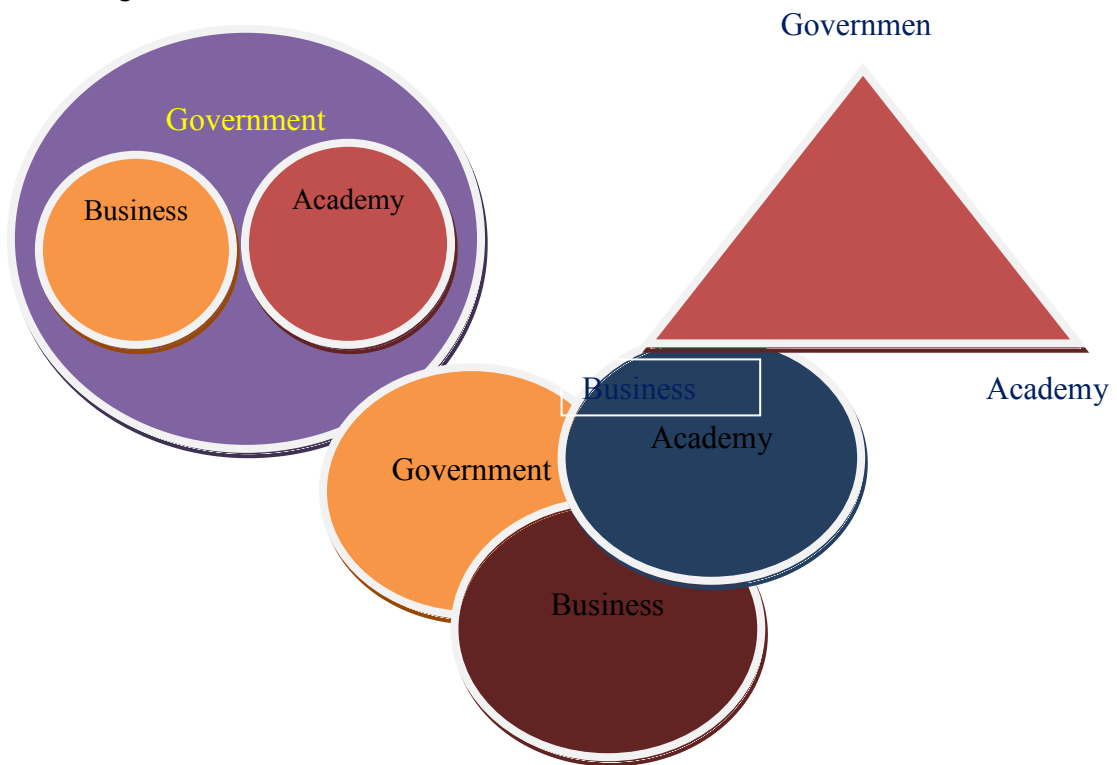
Pendidikan vokasi akan efisien jika lingkungan tempat peserta didik dilatih merupakan replika lingkungan tempat nantinya ia bekerja. Pendidikan vokasi akan efektif hanya jika diberikan dengan tugas-tugas latihan yang dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja (Prosser, 1925). Dua hal tersebut merupakan bagian dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan vokasi yang masih dianggap relevan hingga saat ini. Dalam era revolusi industri prinsip tersebut relatif mudah dipenuhi, namun dalam era perkembangan teknologi yang begitu cepat tampaknya sangat sulit bagi dunia pendidikan untuk mengejar ketertinggalannya

dengan dunia kerja. Oleh karenanya kerjasama sinergis merupakan alternatif solusi yang harus dilakukan.

Globalization and digitized forces in today's world increase the competitive pressures on companies, countries and regions more than before. The increased competition has made innovation more crucial on the market in order to, not only survive but to grow and flourish. Innovations and creativity are today the drivers in the Western economies since cheap and skilled workforce from the East constantly increases. To stay competitive, the Western companies must create innovative cultures and structures in order to create value (Lindmark, Stuesson & Roos, 2009:10).

Menyimak analisis Lindmark, dkk tersebut tampak jelas bahwa dalam era mendatang kolaborasi, inovasi dan kreatifitas merupakan kunci penting suatu masyarakat, organisasi maupun negara tidak saja untuk bertahan, namun juga untuk bersaing dan berjaya. Selaras dengan fungsinya, pendidikan vokasi sebagai pemandu pertumbuhan ekonomi, dan agen perubahan dituntut mampu menghasilkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan suatu inovasi ataupun kreatifitas. Oleh karenanya pendidikan vokasi diharapkan menjadi motor penggerak bagi upaya kolaborasi untuk menghasilkan inovasi (*collaboration for innovation*).

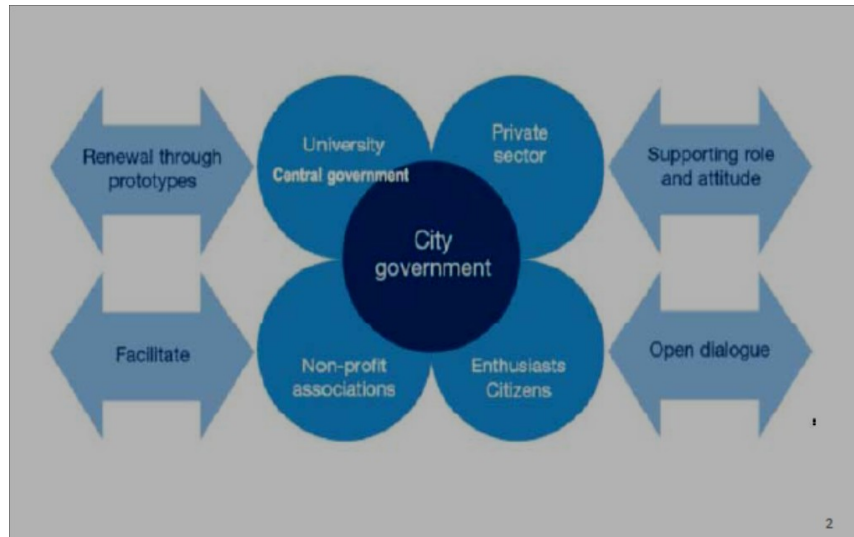
Paling tidak terdapat dua model kolaborasi yang dapat dicoba diterapkan dalam upaya membangun inovasi yaitu *triple helix* dan *penta helix*. Model triple helix merupakan model kerjasama antara pemerintah (*government*), dunia usaha (*business*), dan dunia pendidikan (*academy*). Didalamnya dapat pula terjadi interaksi antar lembaga pemerintah, antar dunia usaha, dan antara dunia pendidikan. Melalui kerjasama sinergis tersebut diharapkan tercipta inovasi-inovasi (oleh perguruan tinggi) yang mampu difasilitasi (oleh pemerintah) dan diwujudkan (oleh dunia industri). Beberapa model kerjasama sinergis *triple helix* (Etzkowitz, 2002: 2-3) dapat dicermati dari gambar 5 berikut:



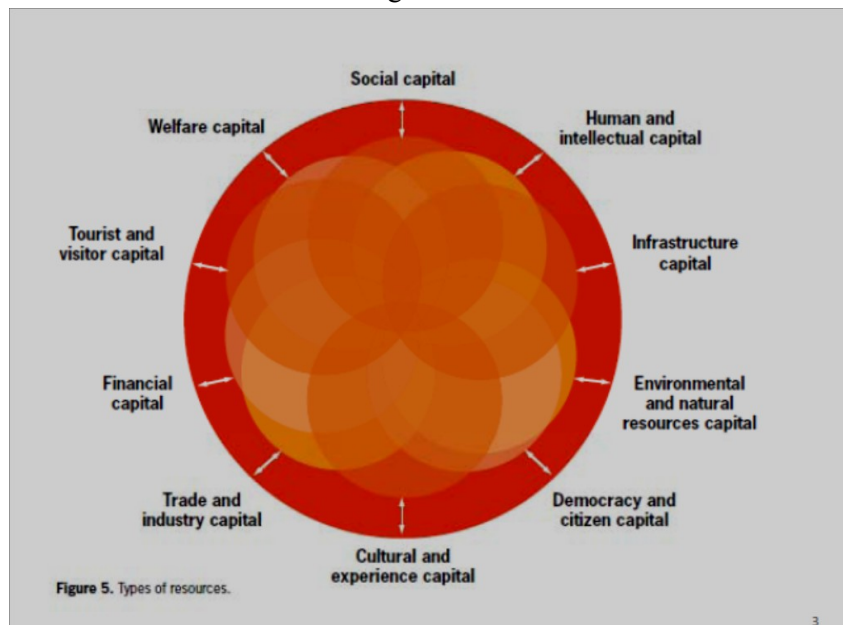
Triple Helix Model II

Gambar 5. Strategi *Triple Helix*

Penta helix (Lindmark, Sturesson & Roos, 2009: 24) merupakan perluasan dari strategi *triple helix* dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi (Gambar 6). Melalui kolaborasi sinergis tersebut diharapkan terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumberdaya yang berinteraksi secara sinergis (Gambar 7).



Gambar 6. Startegi Kolaborasi Penta Helix



Gambar 7. Sharing Sumberdaya dalam Kerangka Kolaborasi Penta Helix

Dari berbagai strategi kolaborasi tersebut, pendidikan vokasi dituntut mampu menentukan strategi yang tepat sehingga proses inovasi akan terjadi dengan dilandasi kolaborasi sinergis antar berbagai pihak. Dengan demikian pendidikan vokasi dapat menjalankan fungsinya sebagai pemandu pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai agen perubahan yang mampu menghasilkan *learning outcome* sesuai tuntutan dunia kerja dalam mendukung daya saing dan kejayaan bangsa.

Penutup

Pendidikan vokasi sebagai bagian dari sistem pendidikan yang menyiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja dituntut mampu menghasilkan *learning outcome* selaras dengan

tuntutan dunia kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing dan kejayaan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi kolaborasi sinergis dengan berbagai unsur baik pemerintah, dunia usaha, lembaga non profit maupun masyarakat luas pada umumnya. Melalui strategi kolaborasi yang tepat diharapkan tumbuh inovasi dan kreatifitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya tahan, daya saing dan kejayaan bangsa.

Daftar Pustaka

- Ace Suryadi dan Ecep Idris. (2004). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan. Bandung: Genesindo 21st Century Student Outcome and Support System. Diambil dari www.21stcenturyskills.org, pada tanggal 23 April 2011*
- Djoko Santoso. (2012). Pengembangan Pendidikan Tinggi Dalam Skala Nasional dan Internasional. *Makalah*. Disampaikan dalam Pelatihan Manajemen bagi Pejabat di Lingkungan UNY, tanggal 13 Februari 2012.
- Etzkowitz, H. (2002). *The Triple Helix of University-Industry-Government. Implications for Policy and Evaluation*. Stockholm: Science Policy Institute
- Lindmark, A., Stureson, E., & Roos, M.N. (2009). *Difficulties of Collaboration for Innovation*. Land University
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Sukamto. (1998). *Perencanaan & Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: PPLPTK Dikti
- Wagiran (2008). Butir-butir Pemikiran Pengembangan Pendidikan Vokasi Secara Holistik. *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Internasional Revitalisi Pendidikan Kejuruan dalam Pengembangan SDM Nasional. Diselenggarakan oleh Aptekindo di Universitas Negeri Padang, 2008.
- Zamroni. (2009). Kebijakan peningkatan mutu sekolah di Indonesia. *Makalah*. Disajikan dalam Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Ke-45 Universitas Negeri Yogyakarta di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta 25 April 2009